

Politik Pembodohan dalam Penciptaan Banalitas Berfikir Masyarakat di Indonesia

Heru Lono Murtopo¹

Binus University, Jakarta, Indonesia
e-mail: herulono.murtopo@binus.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Diterima : 04-07-25
Revisi : 22-07-25
Dipublikasikan : 29-08-25

Kata Kunci:

*Politik pembodohan;
Banalitas Berfikir*

Abstrak

Demokrasi yang sehat mensyaratkan masyarakat yang cerdas. Adanya ketimpangan antara negara yang ideal dengan keadaan negara di Indonesia menjadi petunjuk adanya masalah politik yang tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Penelitian ini secara kuantitatif melihat politik dalam pemikiran filsafat dan menemukan adanya praktek politik pembodohan. Politik pembodohan terjadi ketika secara sengaja politisi membiarkan masyarakat tidak mampu bernalar, bahkan menghalangi daya nalar masyarakat agar tidak bisa kritis.

Abstract

Keywords:

*Politics of duping; Banality
of Thinking*

A healthy democracy requires an intelligent society. The disparity between the ideal state and the reality of the Indonesian state indicates a political issue that deviates from democratic principles. This study qualitatively examines politics from a philosophical perspective and identifies the existence of a deliberate practice of political stupefaction. Political stupefaction occurs when politicians intentionally hinder the public's ability to reason critically. This deliberate suppression of critical thinking serves to maintain power and control, ultimately threatening the integrity of democratic institutions.

PENDAHULUAN

Meskipun bentuk negara demokrasi merupakan bentuk negara yang paling ideal, namun ada kelemahan yang harus disikapi dengan bijaksana. Demokrasi memiliki ancaman sekedar didasarkan pada banyaknya suara dan mengabaikan kualitas dari suara tersebut. Para Filsuf Yunani sejak awal, maupun para pendiri bangsa Indonesia sudah menyadari ancaman ini. Demokrasi yang sehat dan ideal, mensyaratkan masyarakat yang cerdas untuk membentuknya.

Demokrasi adalah bentuk negara ideal yang diimpikan dan disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dasar dari



demokrasi ini adalah kesetaraan manusia. Maka di dalamnya memuat sebuah pengakuan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah datang dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar di balik lahirnya system pemerintahan demokrasi di Indonesia.

Awalnya, ketika Indonesia mau merdeka, tentu harus menentukan bentuk negara yang akan didirikan. Dalam kesempatan itu, BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dipercaya menentukan salah satunya adalah bentuk negara Indonesia berdiskusi. Sayangnya, perdebatan memanas. Beberapa anggota BPUPKI mengusulkan bentuk monarki (kerajaan), sementara lainnya mendukung republik. Pada tanggal 10 Juli 1945, Muhammad Yamin mengusulkan voting untuk menentukan pilihan.

Hasil votingnya, 54 anggota mengusulkan bentuk negara demokrasi, 6 orang anggota mengusulkan bentuk negara monarki dan 1 orang anggota abstain (Mahfud MD, 2016). Segera setelah keputusan tersebut diambil, Soekarno dan kawan-kawannya menegaskan pentingnya kebijaksanaan yang harus menjwai seluruh kehidupan berbangsa dalam pidatonya. Hal ini kemudian dituangkan dalam prinsip Pancasila sila ke empat. Masalahnya, semakin hari semakin disadari bahwa ancaman demokrasi itulah yang sekarang ini nampak sebagai fenomena. Salah satu kemungkinan penyebab dari adanya kedangkalan atau banalitas berfikir masyarakat Indonesia. Kedangkalan cara berfikir yang menggejala secara massal tersebut dalam sebuah penyelenggaraan negara bisa dipastikan diakibatkan adanya sistem yang salah. Paul Emes, seorang pemerhati kebijakan publik, dalam sebuah opininya mengatakan, "*rakyat yang bodoh adalah jaminan umur panjang bagi kekuasaan. Di berbagai negara, kebijakan yang memperbodoh rakyat selalu menjadi senjata utama untuk mempertahankan dominasi.*"

Cauna Dewuley Ikona, dalam sebuah opini mengatakan hal serupa, "*Ada anggapan bahwa ketidakmampuan sebagian besar masyarakat dalam memahami dan mengkritisi situasi yang ada bukanlah sekadar kekurangan intelektual, melainkan akibat dari sistem yang dengan sengaja mempertahankan kebodohan itu sendiri. Mengapa? Karena bagi segelintir elit yang memiliki kekuasaan dan modal, rakyat yang bodoh lebih mudah dikendalikan.*"

METODE

Penelitian kualitatif ini pertama tama akan mencoba menguraikan makna dasar dari istilah yang dijadikan judul, politik pembodohan. Methodanya adalah narasi diskriptif literatur. Metode penelitian deskriptif naratif adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada penggambaran dan penafsiran cerita atau pengalaman secara utuh. Pendekatan ini menggunakan narasi literatur untuk memahami fenomena sosial dan pengalaman manusia. Hal itu akan didukung dengan teori teori filsafat politik yang mengarah pada argumentasi adanya praktek politik pembodohan. Setelah itu, sebagai data kami akan menyampaikan berbagai pandangan, temuan, dan rumusan yang menjadi petunjuk untuk terjadinya politik pembodohan. Data akan kami kumpulkan dari jurnal, opini, maupun naskah naskah proceeding. Berita di media akan dijadikan data pendukung.

Uraian tentang politik pembodohan akan kami sampaikan dengan berfokus pada istilah pembodohan. Pembodohan berasal dari kata bodoh. Bodoh merupakan kata sifat yang berarti tidak mudah untuk mengerti. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai , “*tidak lekas mengerti; tidak mudah tahu atau tidak dapat* (mengerjakan dan sebagainya)”. Bodoh juga memiliki arti berikutnya, “*tidak memiliki pengetahuan* (pendidikan, pengalaman)”. Sebagai kata benda, bodoh terbendakan dalam kata kebodohan.

Proses pada kebodohan itu disebut sebagai pembodohan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membodohkan. Perbuatan yang dengan sengaja menjadikan seseorang bodoh. Politik pembodohan sengaja kami gunakan di sini sebagai istilah praktis bahwa pembodohan itu terjadi karena sebuah peristiwa politik. Sehingga dalam Bahasa Indonesia, istilah tersebut tidak bisa dibalik menjadi pembodohan politik. Arti pembodohan politik sudah berbeda dengan politik pembodohan. Pembodohan politik merupakan sebuah upaya untuk menjadikan masyarakat bodoh di bidang politik. Kata kunci di sini adalah adanya unsur kesengajaan. Politik pembodohan adalah sebuah tindakan, gerakan yang bertujuan langsung untuk terciptanya sebuah pembodohan dan kebodohan. Bodoh bukan pada taraf intelektual dan bernalar, namun pada taraf kerangka berfikir yang termanipulasi.

Ada dua tokoh menarik untuk berbicara tentang politik dan pembodohan ini yaitu M. Foucault dan Hannah Arendt (Prawira,2021). Banyak pemikir lain yang membicarakan pembodohan yang disengaja ini. Misalnya, Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dari gereja yang mengaku dan sangat berperan dalam bangkitnya teologi pembebasan memiliki beberapa kesimpulan mendasar berkaitan dengan pemikiran politiknya. Menurut Dietrich Bonhoeffer Kebodohan bukanlah sekadar kekurangan intelektual, melainkan kegagalan moral yang lebih dalam. Kebodohan merupakan penolakan terhadap refleksi diri dan kritisisme (Hadi Nur, 2024). Menurut Bonhoeffer, kita lebih takut pada orang bodoh daripada orang jahat. Kejahatan mudah dikenali dan dilawan, tetapi kebodohan tidak mudah dikenali, bahkan seringkali disertai dengan pembenaran pembenaran yang mendukung. Hal ini dia sampaikan melalui Surat dari Penjara ketika dia akan dieksekusi oleh pemerintahan NAZI. Waktu itu, dia melihat kejanggalan intelektual, pejabat, dan terutama para pendeta di Jerman yang membenarkan kebijakan NAZI yang otoriter dan rasial.

Sementara itu, Hannah Arendt sebagai seorang filsuf, memiliki pemikiran yang jauh lebih mendalam. Hal itu dia tuangkan dalam bukunya, *Truth and Politics*. Di situ, dia berpendapat bahwa istilah politik dan kebenaran sebenarnya bertentangan karena tidak ada tempat untuk kebenaran dalam politik. Kebenaran merupakan sesuatu yang “kita tidak dapat ubah; atau secara metaforis, kebenaran adalah tanah tempat kita berdiri dan langit yang membentang di atas kita.” Dunia politik menurut Arendt merupakan urusan manusia serta konstelasi ide dan pendapat dalam masyarakat, bukan pertama tama merupakan hal yang berkaitan dengan sistem negara atau struktur hierarkis dari pemerintahan.

Penjelasan lebih lanjut dia mengatakan, meskipun demikian, dia mengakui dua jenis kebenaran berbeda; kebenaran rasional dan kebenaran faktual. Kebenaran rasional adalah kebenaran ilmiah, atau kebenaran matematika. Arendt yakin bahwa kebenaran rasional yang dihasilkan oleh pikiran manusia memiliki sifat yang sangat kaku yang tampaknya tidak sesuai dengan sifat politik. Dia pada dasarnya berpendapat bahwa "*kebalikan dari pernyataan yang benar secara rasional adalah kesalahan dan ketidaktahuan, seperti dalam sains, atau ilusi*

dan pendapat, seperti dalam filsafat" (Rizky Prawira, 2023). Perdebatan yang terletak pada perselisihan antara pendapat dan fakta, atau benar dan salah secara alamiah, menjadi refleksi dari hubungan antara politik dan kebenaran rasional. Berbeda dengan kebenaran rasional, kebenaran faktual terkait dengan politik.

Hubungan antara politik dan kebenaran faktual tidak selalu selaras. Kebenaran faktual dapat menderita nasib yang sama dengan kebenaran rasional jika dihadapkan pada politik, karena karakteristik keduanya yang cukup lemah terhadap para pemegang opini. Bahkan, kebenaran faktual sangat rapuh setelah terpapar ke ranah publik, karena dapat dipengaruhi oleh, atau bahkan diubah menjadi opini. Oleh karena itu, jelas bahwa terdapat masalah dalam hubungan antar keduanya.

Menurutnya, dari perspektif politik, kebenaran dapat dilihat sebagai ancaman, karena karakter despotiknya dapat menyebabkan persaingan dengan tiran yang memerintah. Hal ini juga membuktikan bahwa kebenaran dapat menjadi lawan bagi penerapan politik secara umum (sistem negara, pemerintahan hierarkis).

Michel Foucault memiliki pandangan yang berbeda. Hal itu dia tuangkan dalam bukunya: *Kekuasaan, Pengetahuan, dan Kebenaran*. Dia lebih banyak menggunakan istilah 'kekuasaan' (power) bukan politik. Dia mendefinisikan kekuasaan sebagai hak bagi orang untuk memiliki akses ke komoditas dan memiliki otoritas untuk mentransfernya melalui mekanisme atau tindakan. Kekuasaan juga sesuatu milik individu yang "*memungkinkan kekuasaan politik atau kedaulatan untuk didirikan*". Kekuasaan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan dipraktikkan .

"Kekuasaan merepresi alam, naluri, kelas, dan individu, dan kekuasaan sebagai bentuk represi juga telah menjadi bagian dalam wacana modern". Wacana kekuasaan ini ditransmisikan ke dalam individu. Praktik politik sebenarnya diartikulasikan melalui kegiatan individu. Foucault melihat ada hubungan erat antara kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran. Ada hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang tidak dapat dibangun tanpa pembentukan wacana. Dia juga

berpendapat bahwa masyarakat “tunduk pada produksi kebenaran melalui kekuasaan dan kita tidak dapat menjalankan kekuasaan kecuali melalui produksi kebenaran”

Jadi, pengetahuan dan kebenaran dalam hal ini, bukanlah sesuatu yang given atau 'sudah ada', melainkan produk-produk dari wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Di sisi lain, kebenaran dan pengetahuan ini juga penting untuk menjalankan praktik kekuasaan itu sendiri hubungan antara kekuasaan dan kebenaran menurut Foucault saling konstitutif. Kekuatan, pengetahuan, dan konsepsi kebenaran Foucault dalam hal sains juga menunjukkan ide-ide serupa. Misalnya, Foucault berpendapat bahwa "praktik psikiatri sebenarnya berkaitan erat dengan berbagai macam institusi, persyaratan ekonomi, dan masalah politik peraturan sosial".

Ada perbedaan cara pandang sekaligus persinggungan antara pemikiran Hannah Arendt dan Michael Foucault. Hannah Arendt lebih melihat asal usul politik sebagai kebenaran yang terdiri dari kebenaran rasional dan kebenaran faktual, Foucault menempatkan politik sebagai relasi kuasa. Kekuasaan membangun pengetahuan. Kemudian, dalam kaitannya dengan asal usul politik, Arendt berpendapat bahwa tindakan manusia bersifat politis. Bahkan, tindakan diidentifikasi dengan politik, dalam arti bahwa politik adalah tindakan dan tindakan adalah politik. Inilah yang dikenal dengan teori tindakan politik (Prawira, 2023). Orang tidak bisa bertindak dalam kesendirian. Sebuah tindakan tidak bermakna kalau tidak ada orang lain yang hadir, menyaksikan dan memberi makna terhadapnya. Jadi kondisi yang ada dalam sebuah tindakan manusia adalah pluralitas, di mana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain dan berinteraksi dengan mereka sebagai pribadi yang khas. Tindakan harus diiringi dengan pembicaraan karena tanpa pembicaraan, tindakan tidak beda dengan robot atau mesin yang dioperasikan oleh tangan-tangan tak kelihatan.

Tindakan dan pembicaraan saling mengandaikan. Lewat pembicaraan atau bahasa yang diucapkan seseorang mengartikulasikan makna dan menyesuaikan tindakannya dalam konteks pluralitas. Sebaliknya, pembicaraan menuntut tindakan,

dalam arti bahwa pembicaraan itu sendiri adalah sebuah tindakan yang dipakai sebagai sarana untuk mengecek ketulusan pembicara.

Bagi Arendt, politik sebagai pembicaraan dimungkinkan oleh adanya kemampuan manusia untuk berpikir, menilai, dan membuat keputusan. Perdebatan muncul bukan karena orang secara sengaja menciptakan konflik tetapi karena konflik itu inheren dalam perbedaan. Karena itu, bagi Arendt, wilayah publik tidak pernah netral atau sebuah tempat di mana orang menghindari diri dari perbedaan agar hidup dalam sebuah kedamaian universal. Sebaliknya, politik merupakan sebuah ruang publik di mana orang-orang yang berbeda beragumen, berdeliberasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan bersama.

Dalam konteks ini, berbeda dengan ide netralitas negara yang diusung kaum liberal, negara justru diwajibkan menawarkan ‘persuasi demokratis’, dalam arti bahwa negara melindungi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat atau perspektif masing-masing dan ketika negara ‘berbicara’ atau menyampaikan pernyataan-pernyataan lewat pejabat publik, negara “*affirmatively take the side of upholding free and equal citizenship*”. Intinya, negara tidak boleh netral berkaitan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan yaitu bahwa semua warga negara hendaknya diperlakukan sebagai pribadi yang bebas dan sederajat. Negara hendaknya melindungi kebebasan berbicara warga negara sebagai tanda penghormatan terhadap kebebasan dan kesamaan.

Hannah Arendt membahas teori filsafat politiknya dalam konteks totalitarianisme Hitler dan juga peristiwa holocaust. Dalam perjalanan pemikirannya Hannah Arendt sampai pada sebuah pemikiran kunci akan adanya banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan (*banality of evil*) adalah situasi di mana seseorang melakukan tindakan jahat tanpa memiliki kesadaran atau pemahaman yang mendalam tentang kejahatan yang dilakukannya (*absence of mind*). Ia menekankan bahwa kejahatan bisa menjadi sesuatu yang normal atau biasa dalam konteks politik tertentu.

Dalam bukunya *Banality Of Evil* tersebut¹, dia menjelaskan mengapa Adolf Eichmann, salah satu pejabat Nazi yang memainkan peran penting dalam Holocaust, tidak tampak sebagai sosok jahat dalam persidangannya. Ia berpendapat bahwa Eichmann bukan karena sifat jahatnya, melainkan karena ia adalah seorang birokrat yang menjalankan perintah tanpa mempertanyakan moralitas tindakan tersebut. Eichmann menurutnya adalah korban. Dia menjadi individu yang cenderung kehilangan kemampuan untuk berfikir kritis dan mempertanyakan otoritas, sehingga tindakan jahat dianggap sebagai bagian dari rutinitas. Kejahatan ini diakibatkan oleh matinya hati nurani. Hati nurani tidak bisa peka terhadap situasi dan tidak mampu untuk berempati terhadap korban kejahatan.

Akhirnya, banalitas kejahatan juga berkaitan dengan normalisasi kejahatan. Tindakan yang seharusnya dianggap sangat jahat, seperti pembunuhan massal, dalam konteks politik tertentu bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan wajar. Istilah banalitas inilah yang kemudian kami gunakan untuk menjelaskan akibat dari politik pembodohan ini. Arti kata banal sesuai KBBI berarti dangkal, kasar (tidak elok) dan biasa. Melalui ketiga kriteria tersebut, kita memahami bahwa cara berfikir masyarakat Indonesia mencapai tahap banalitas kompleks. Banyak hal yang tidak benar dinormalkan, dijadikan dan dianggap normal (Hertanto,2024).

Sebagai bentuk ukuran bagaimana masyarakat akhirnya membuat keputusan apakah sudah dewasa atau belum, apakah sudah sesuai dengan hati nurani atau belum, kita bisa menggalinya dari teori tahap tahap perkembangan moral dari Laurence Kohlberg. Dalam penelitiannya, Kohlberg kemudian memiliki pandangan tahap-tahap perkembangan moral sebagai berikut:

Tingkat 1: Prakonvensional

Tahap ini adalah tingkat terbawah dari perkembangan moral. Pada tahap ini anak tidak menunjukkan tingkat internalisasi nilai-nilai moral karena penalaran moral ditentukan oleh hukuman dan ganjaran dari luar. Di dalamnya ada aturan-

¹ Meskipun, ada banyak kritik untuk Arendt bahwa kejahatan dan kesalahan ini sesungguhnya disadari oleh Eichmann. Sejarawan Deborah Lipstadt berpendapat bahwa Arendt gagal menjelaskan mengapa Eichmann dan rekan-rekannya berusaha menghancurkan bukti kejahatan perang mereka, jika dia memang tidak menyadari kesalahannya.

aturan budaya, baik dan buruk serta benar dan salah dilihat dari segi akibat fisik atau kenikmatan perbuatan, seperti hukuman, keuntungan, dan pertukaran kebaikan atau dari segi kekuatan fisik mereka.

Mereka menentukan pertimbangan moral dan memahami keputusan berdasarkan otoritas. Tahap pra-konvensional merupakan penalaran moral yang umumnya ada pada masa kanak-kanak. Seseorang yang berada dalam tingkat pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat pra-konvensional dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

Tahap 1: Orientasi hukuman dan kepatuhan

Tahap 2: Orientasi relativis-instrument

Tingkat 2: Konvensional

Umumnya pada tahapan ini seseorang menginternalisasi nilai secara setengah-setengah (intermediate). Anak patuh secara internal pada standar tertentu, tetapi standar itu pada dasarnya ditetapkan oleh orang lain, seperti orangtua, atau oleh aturan sosial. Tingkat kedua ini terdiri dari 2 tahapan:

Tahap 1: Orientasi kesepakatan antara pribadi atau disebut orientasi ‘anak manis’

Tahap 2: Orientasi hukuman dan ketertiban

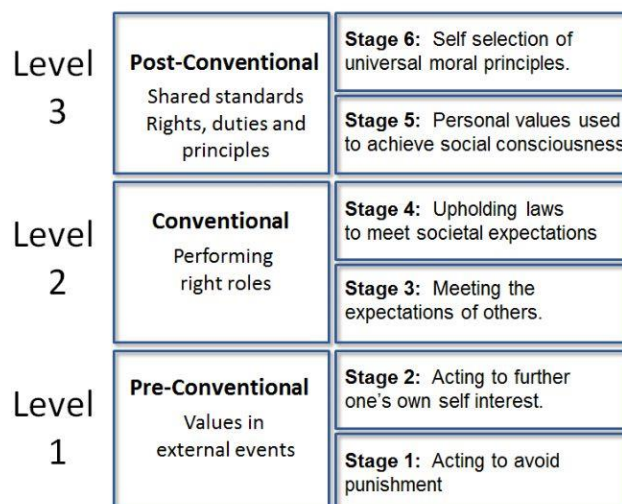
Tingkat 3: Pasca Konvensional

Tahap pasca konvensional adalah tahap tertinggi dalam perkembangan moral dalam teori Kohlberg. Pada tingkat ini moralitas telah sepenuhnya diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar dari luar. Mereka bisa mengeksplorasi dirinya berdasarkan rasionalitas dan terlebih didasarkan pada hati nuraninya. Tingkat ini terdiri dari 2 tahapan:

Tahap 1: Orientasi Kontrak Sosial Legalitas

Tahap 2: Orientasi Prinsip Etika Universal

Ringkasan tiga tingkat dan enam tahap perkembangan moral Kohlberg ini, dapat dilihat dalam gambar berikut:



Bagan sederhana teori Perkembangan Moral Kohlberg.

Sumber gambar:

https://www.kompasiana.com/nabilahasna7610/60f7dfa11525103c8e464522/apa-saja-teori-perkembangan-moral-kohlberg?page=2&page_images=1

Tahap perkembangan moral tersebut, meskipun dalam penelitiannya didasarkan pada perkembangan usia seseorang, namun dalam prakteknya seseorang dan masyarakat secara psikologi karena pengalamannya bisa tidak sesuai dengan usianya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik pembodohan di Indonesia

Istilah kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat, memiliki tantangan yang fundamental. Di dalamnya ada prinsip kekuasaan mayoritas. Akhirnya golongan yang memiliki suara terbanyaklah yang berkuasa. Maka dari itu, berbagai strategi dilakukan oleh para politisi, untuk merebut suara atau mengumpulkan suara, agar dapat memperoleh simpati masyarakat, agar bisa duduk di parlemen/pemerintahan, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika politik maupun etika publik. Para politikus memainkan relasi kuasa justru berdasarkan modal yang bertujuan langsung untuk memperoleh suara. Pembodohan semacam ini menjadi ancaman terhadap demokrasi. Proses pembodohan mencakup penyebaran informasi yang salah, manipulasi fakta, dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan lembaga-lembaga demokratis. Ketika masyarakat diberikan informasi yang salah

atau disinformasi, proses pengambilan keputusan yang demokratis menjadi terganggu (Yuliah, Sudrajat).

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, merupakan salah satu konsep yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan partisipasi aktif. Dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, baik melalui pemilu, kebebasan berpendapat, maupun penyampaian aspirasi. Namun, di balik janji idealis demokrasi, terdapat tantangan besar yang sering kali mengemuka: fenomena pembodohan masyarakat.

Kadang kala Demokrasi memang tampak sebagai membuka peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman, akses informasi, dan kesadaran warga negara. Ketika elemen-elemen tersebut lemah, demokrasi dapat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, serta penyebaran narasi yang menyesatkan.

Proses Pembodohan masyarakat sering kali terjadi melalui kontrol informasi, propaganda, dan penyebaran berita palsu. Dalam situasi ini, masyarakat kerap dijadikan sasaran manipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi. Akibatnya, kesadaran kritis berkurang, dan masyarakat menjadi lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Fenomena pembodohan masyarakat sering kali dirancang dengan cara yang sistematis. Menurut Chapy Hakim, Pusat Studi Air Power Indonesia, Demokrasi dan Tantangan Pembodohan Masyarakat, ada beberapa bentuk yang umum terjadi. Di antaranya adalah: penguasaan informasi, politik uang, sistem pendidikan yang lemah, dll (Hakim, Syawawi). Sedangkan dampaknya adalah terpilihnya pemimpin pemimpin yang tidak berkualitas, pemilihan pemimpin yang hanya didasarkan pada popularitas dan bukan kemampuan dan integritas, turunnya kepercayaan publik, dll. Ada beberapa bentuk fenomena lagi berkaitan dengan demokrasi yang bisa kita jadikan contoh akibat dari cara berfikir masyarakat yang cenderung dangkal, seperti politik identitas dan politik agama, hoaks, maupun penormalan atau pewajaran terhadap tindak koruptif terhadap moral, baik tindak korupsi langsung maupun tidak

langsung. Masyarakat, selain menganggap wajar, juga banalitas itu terindikasi sangat struktural atau disengaja karena mereka dihadapkan pada pilihan untuk memilih lain. Demikian halnya ketika mereka tidak setuju tetapi terhalang oleh birokrasi. Termasuk yang terutama adalah ruang untuk berfikir kritis yang sangat dibatasi.

Dari berbagai macam fenomena tersebut, berkaitan dengan banalitas berfikir masyarakat bisa dilihat dalam kerangka pemikiran Laurence Kohlberg, bahwa keputusan dan pertimbangan masyarakat hampir tidak pernah sampai pada pertimbangan hati nurani yang rasional. Faktor utama yang menyebabkan maraknya politik uang adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rendah. Dalam situasi seperti ini, insentif material dianggap lebih konkret dibandingkan janji-janji politik yang sering kali dianggap abstrak dan sulit dipenuhi. Bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang rendah, politik uang dipandang sebagai bentuk bantuan langsung yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara instan (Yusuf, dkk, 2021). Hal ini tampak bahwa pertimbangan moral berfikir masyarakat yang menerima uang adalah tahap paling awal dalam kerangka perkembangan moral Kohlberg. Mereka cenderung dengan pemikiran timbal balik yang instant. Pola pikir masyarakat yang seperti inilah yang dimanfaatkan oleh kebanyakan politikus di Indonesia.

Politik identitas dan agama cenderung memanfaatkan pola pikir masyarakat yang dalam kerangka perkembangan moral Kohlberg di level kedua. Tahap remaja di mana mereka adala dalam ikatan sosial dan cenderung menghindari konflik. Mereka bukan orang orang yang secara intelektual buruk. Namun, dengan berbagai cara, cara berfikir mereka dimanipulasi dan diarahkan secara terus menerus pada kesetiaan kelompok. Media yang digunakan adalah penekanan narasi dengan mengutip sedikit fakta, atau bahkan benar benar membuat narasi palsu yang dikenal dengan hoaks melalui berbagai cara. Secara positif agama dan juga kesukuan menjadi sarana efektif untuk mencari suara. Hal ini sudah ada sejak munculnya konsep negara demokrasi.

Namun demikian, bahaya dari politik identitas dan agama menjadikan masyarakat cenderung ikut ikutan dalam memilih dan mengabaikan hati nurani.

Secara historis, politik identitas di Indonesia bisa bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Misalnya, ketika agenda yang diperjuangkan menjadikan agama sebagai ideologi utama dalam menyebarkan gagasan. Penyebaran gagasan, yang menjadikan agama sebagai ideologi menimbulkan pertentangan antara agama di satu sisi, dengan negara pada sisi lain (wihardjo, 2018). Namun demikian, secara praktis dan banal agama cenderung dijadikan alat untuk meraih suara dan dengan demikian pembodohan terjadi.

Banalitas berfikir masyarakat berpuncak pada normalisasi adanya penyimpangan dan kejahatan demokrasi. Dengan memanfaatkan psikologi partisan (the partisan brain), para politikus menjadi leluasa untuk melakukan kejahatan demokrasi. Dengan psikologi semacam itu, mereka tetap mendapatkan dukungan. Misalnya saja, seorang koruptor yang tetap didukung oleh pemilihnya untuk berkuasa. Demikian halnya dengan absennya janji politik terhadap realisasi di masyarakat. Janji politik tidak harus dipenuhi. Tidak ada konsekuensi hukum di masyarakat, kecuali sekedar menjadi bahan pertengkaran di masyarakat maupun di media sosial.

KESIMPULAN

Hannah Arendt secara mendasar menguraikan asal usul politik manusia dan bagaimana manusia mengolah kebenaran. Menurutnya, kebenaran politik secara objektif tidak pernah ada. Kebenaran dalam politik adalah kebenaran faktual bukan kebenaran rasional. Kebenaran faktual menjadi sangat subjektif dan relatif. Dalam analisisnya, Hannah Arendt sampai pada sebuah teori banalitas kejahatan yang diakibatkan oleh adanya kebenaran faktual tersebut. Michael Foucault menempatkan politik pada relasi kuasa di mana berkat modalitas yang dimiliki, seseorang atau sekelompok orang dapat menciptakan pengetahuan yang kami maknai juga sebagai cara berfikir.

Akibat adanya fenomena politik pembodohan tampak dalam berbagai praktek politik di masyarakat Indonesia. Hal itu terjadi karena adanya kedangkalan berfikir di mana dalam teori tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg

kebanyakan masyarakat Indonesia tidak sampai pada pemikiran yang berdasarkan hati nuraninya.

Limitasi dan Rekomendasi

Penelitian dalam paper ini bersifat kualitatif. Untuk penelitian berikutnya bisa dikembangkan dengan mempertajam penelitian secara kuantitatif untuk bertanya persisnya berapa persen masyarakat yang memilih dan berdemokrasi tidak didasarkan pada pertimbangan dan keputusan hati nurani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, 2021, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan” dalam *Jurnal Awasia*, Vol.1 No 2, Desember 2021
- Arendt, H. (1951). *The origins of totalitarianism*. Harcourt Brace.
- Arendt, H. (1958). *The human condition*. University of Chicago Press.
- Arendt, H. (1961). *Between past and future*. The Viking Press.
- Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil*. Viking Press.
- Arendt, H. (1972). *Crises of the republic*. Harcourt.
- Arendt, H. (1978). *The life of the mind*. Harcourt.
- Arendt, H. (1994). *Essays in understanding* (J. Kohn, Ed.). Schocken Books.
- Arendt, H. (2005). *The promise of politics*. Schocken Books.
- Arendt, H. (2006). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Penguin Books.
- Azra, A. (2021). *Membendung oligarki*. Kompas.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Benhabib, S. (2012). *Arendt and Adorno: The elusiveness of the particular and the Benjaminian moment*. Stanford University Press.
- Bolo, A. D. (2024). Model Kepemimpinan Indonesia di Tengah Politik Uang (Money Politics): Sebuah Refleksi Filosofis terhadap Pemilu 2024. dalam *Jurnal Pembumian Pancasila*, 4(2), 79–90.

- Bonhoeffer, D. (2005). *Letters and Papers from Prison*. SCM Press.
- Brettschneider, C. (2014). *Democratic persuasion and freedom of speech: A response to four critics and two allies*. *Brooklyn Law Review*, 79, 1059–1083.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Hadi Nur. (2024). *Kemerdekaan untuk Mengatasi Kebodohan*. Universitas Negeri Malang Blog. Diakses dari <http://hadinur.blog.um.ac.id/2024/01/13/kemerdekaan-untuk-mengatasi-kebodohan/>
- Hakim, C. (2023). Demokrasi dan tantangan pembodohan masyarakat. <https://www.netralnews.com/demokrasi-dan-tantangan-pembodohan-masyarakat/aTNIUy9EMytrV0NQU2JzUUICaTBVUT09>
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Pantheon Books.
- Hertanto, Y. (2024). Banalitas komunal di media sosial. <https://kumparan.com/yudhi-hertanto/banalitas-komunal-di-media-sosial-1v1HLFdRI2x/1>
- Ibda, F. (2023). Perkembangan Moral dalam Pandangan Lawrence Kohlberg, dalam jurnal *Intelektualita*, 12(1), 42–78
- Kellner, D. (2005). *Media Spectacle and the Crisis of Democracy: Terrorism, War, and Election Battles*. Paradigm Publishers.
- Kohlberg, L. (1984). *Essays on Moral Development: Vol. 2. The Psychology of Moral Development*. Harper & Row.

- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Mahfud MD. (2016). Negara ini dibangun dengan voting. Fakultas Hukum UII.
<https://law.uui.ac.id/blog/2016/09/17/negara-ini-dibangun-dengan-voting/>
- McKee, A. (2003). *Textual Analysis: A Beginner's Guide*. SAGE Publications
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-ID” dan Patron-Klien, dalam *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58.
- Muhyi, A. D. S. (2023). Marketing Politik Kampanye Religius Pemilu di Indonesia. dalam *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(2), 77–91.
- Prawira, M. R. (2023). Analisis Politik dan Kebenaran: Membandingkan Pemikiran Arendt dan Foucault. Dalam *jurnal Arajang*, 5(2), 140–154.
- Syarifudin. (2022). Agama dan Politik: Apa yang Tuhan Perbuat Dengannya? dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(2), 295–298.
- Syawawi, R. (2023). Politik uang dan pembodohan publik.
<https://www.tempo.co/kolom/politik-uang-dan-pembodohan-publik-931883>
- Wahyuningroem, S. (2021). Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan dan Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku. Dalam *Jurnal Politika*, 12(2), 236–251
- White, T. (2020). What did Hannah Arendt really mean by the banality of evil?
<https://aeon.co/ideas/what-did-hannah-arendt-really-mean-by-the-banality-of-evil>
- Yuliah, A., & Sudrajat, A. S. (2020). Dinamika Antara Proses Pembodohan, Demokrasi, dan Administrasi Publik. Prosiding KNIA STIA LAN Bandung.
<https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/945>
- Yusuf, A., Ramadhani, I., & Khairunnisa, N. (2021). Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. Dalam *Jurnal Indonesian Journal of Law*, 7(1), 104–108.